

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional eksistensi saat ini adalah sebagai ilmu yang mandiri, kemandirian ini merupakan proses keilmuan yang panjang. Hubungan internasional merupakan suatu studi yang telah lama ada dan masih ada sampai saat ini, walaupun pada waktu tertentu mengalami kemajuan dan perubahan dalam beberapa bidang yang diikuti oleh kemajuan dalam bidang yang lain yang menyesuaikan dengan kemajuan teknologi dunia. Eksistensi hubungan internasional dimulai pada tahun 1930 setelah perang dunia pertama yang juga mengikuti ilmu sosial dan politik. Studi hubungan internasional memiliki relasi dengan politik terutama politik Internasional antar negara, selain itu dibebberapa bagian studi hubungan internasional merupakan salah satu bagian dari sejarah yaitu diplomasi dan strategi. (Darmayadi *et al.*, 2015 : 10-18).

Hubungan internasional adalah studi mengenai interaksi antar aktor-aktor atau kesatuan sosial tertentu termaksud segala sesuatu diseputar interaksi tersebut. Interaksi tersebut berlangsung didalam sistem internasional, dimana negara merupakan aktor utama (Soeprapto, 2000 : 10). Hubungan internasional merupakan interaksi antar aktor negara dengan negara dan actor negara dengan non-negara berupa politik, ekonomi, sosial dan budaya untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara (Azizah, 2017: 168).

Hubungan internasional sebagai bentuk interaksi antar aktor dan anggota masyarakat, yang mencakup segala aspek untuk mencapai kepentingan nasional, dengan tujuan mengembangkan kemajuan negara. Interaksi yang dilakukan lintas batas negara yaitu oleh *state actor* atau *non state actor*. Dalam buku P. Antonius Sitepu mengenai Studi Hubungan internasional menjelaskan, untuk memahami sifat kajian dalam hubungan internasional maka Karl Deutsch membagi substansi studi hubungan internasional dalam beberapa kelompok yaitu : bangsa dan dunia dalam bentuk apa hubungan dengan negara lain di buat; proses transisional dan interdependensi internasional, sejauh mana pemerintah dan rakyat suatu negara bangsa (*national-state*) bisa menentukan masa depannya sendiri; perang dan damai, bagaimana terjadinya perang dimasa lalu dan bagaimana yang terjadi saat ini; kekuatan dan kelemahan dari suatu pemerintahan; politik internasional yang berhubungan dengan masyarakat bangsa-bangsa; kelalaian dalam bidang kependudukan, sumber daya alam, pangan dan lingkungan akan menimbulkan ancaman terhadap keamanan internasional; kemakmuran dan kemiskinan; kebebasan dan penindasan, dimana yang diartikan sebagai kebebasan masyarakat dalam menentukan sebuah pilihannya sendiri dan toleransi terhadap perilaku kaum minoritas (Sitepu, 2011 : 22-25).

Pandangan mengenai kajian hubungan internasional menurut Karl, terkait dengan masalah-masalah terhadap perilaku para aktor-aktor individu dan lembaga yang ikut terlibat dalam arena internasional yang berhubungan dengan perilaku yang menggerakkan perilaku mereka dengan pengaruh yang muncul secara timbal balik antara aktor-aktor dan struktur dalam hubungan internasional.

Hubungan internasional dapat di artikan sebagai hubungan antar bangsa, atau global yang meliputi semua aspek hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Hubungan internasional juga sebagai istilah hubungan antar negara untuk menandai sebuah hubungan tertentu, yang ditandai dengan hubungan yang melintasi kedaulatan batas negara dengan lahirnya *Multinational corporations* (MNC's) (Sitepu, 2011 : 32).

Pada globalisasi saat ini hubungan internasional bagi sebuah negara merupakan sebuah keharusan yang menjadi tujuan negara dalam mencapai kepentingan nasional untuk membangun negara, kerja sama merupakan sebuah keharusan yang menjadi salah satu jalan keluar dalam membangun kedaulatan negara dan untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat. Negara merupakan instrumen aktor yang menjadi acuan dalam kerja sama antar negara, pada dasarnya kerja sama hubungan internasional bisa terjadi melalui kendala dan masalah yang dihadapi oleh negara atau non negara yang memerlukan bantuan negara lain atau bantuan sebuah lembaga organisasi internasional, meningkatkan perekonomian lewat ekspor impor, dan dalam rangka pengembangan negara dalam meningkatkan politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Oleh sebab itu hubungan internasional menjadi acuan untuk semua aspek ruang lingkup negara dan internasional.

2.1.2 Organisasi Internasional

Hubungan kerja sama antar negara secara internasional dapat dilakukan melalui beberapa cara, misalnya hubungan diplomasi antar negara sebagai bentuk

perjanjian internasional juga merupakan salah satu wujud dari terjadinya aktivitas kerja sama hubungan internasional. Selain itu, bentuk kerja sama internasional lainnya dapat dilakukan melalui organisasi-organisasi internasional. Organisasi internasional merupakan salah satu aktor penting dalam hubungan internasional selain negara.

Definisi yang dikemukakan oleh May Rudy mengenai Organisasi Internasional adalah sebuah pola kerja sama yang terjadi lewat lintas batas-batas suatu negara, yang dimana memiliki struktur kerja sama atau hubungan yang jelas sehingga mampu mereplikasikan tujuan-tujuan bersama yang disepakati bersama. Selain itu dalam buku Perwita Anak Agung dan Yani mendefinisikan Organisasi Internasional sebagai berikut :

Organisasi internasional didefinisikan sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atau sebuah kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih negara yang berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya. Lebih lanjut, upaya mendefinisikan suatu organisasi internasional harus melihat tujuan yang ingin dicapai, institusi-institusi yang ada, suatu proses perkiraan peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah terhadap hubungan antara suatu negara dengan aktor-aktor non negara (Perwita & Yani, 2005 : 92).

Organisasi internasional merupakan salah satu aktor penting dalam hubungan internasional. Sebuah Organisasi sangat penting dan memiliki peranan penting dalam konflik atau masalah tertentu karena keikutsertaan sebuah negara atau anggota non negara dapat menyelesaikan permasalahan yang tengah dihadapi

dan bisa memperluas kerja samanya lewat program-program lain dengan organisasi tersebut. Tetapi biasanya tidak semudah yang dibayangkan karena terkadang sebuah organisasi gagal dalam mengatasi sebuah masalah atau konflik yang sedang terjadi. Oleh karena itu Organisasi Internasional mencakup 3 unsur :

1. Keterlibatan negara dalam suatu pola kerja sama
2. Adanya pertemuan-pertemuan secara berkala
3. Adanya staf yang bekerja sebagai pegawai sipil internasional (*international civil servant*).

Bahwa bentuk kejasama harus memiliki persetujuan antar anggota dan organisasi internasional dan mendapatkan kesepakatan dari kerja sama antar kedua belah pihak yaitu organisasi internasional dengan negara atau non negara yang memberikan manfaat secara timbal balik untuk kedua belah pihak. Dari unsur terkait mengenai 3 cakupan dalam organisasi internasional pentingnya keterlibatan karena tanpa keterlibatan tidak akan ada kerja sama, perlunya pertemuan berkala untuk memperbaharui sebuah kerja sama apabila masalah yang dihadapi sudah selesai atau perlu diperharui karena alasan ketidak berdayaan dalam mengatasi permasalahan tersebut, dan terakhir badan staf khusus internasional untuk mengatur dan pelaksanaan kerja sama sehingga apa yang diajukan bisa disepakat dengan baik. Dengan kata lain organisasi internasional dapat dikatakan sebagai suatu asosiasi atau perhimpunan negara-negara yang berdaulat yang terikat pada perjanjian untuk mencapai tujuan bersama yaitu mensejahterakan negara-negara anggotanya.

Menurut Clive Archer klasifikasi organisasi internasional berdasarkan keanggotaannya terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

1. *Type of membership* (tipe keanggotaan)
 - a. *International Governmental Organization* (IGO), yaitu organisasi internasional dengan wakil pemerintahan-pemerintahan sebagai anggota.
 - b. *International Non-Governmental Organizations* (INGO), yaitu organisasi internasional dimana anggotanya bukan mewakili pemerintahan.
2. *Extent of membership* (jangkauan keanggotaan)
 - a. Keanggotaan yang terbatas dalam wilayah tertentu.
 - b. Keanggotaan yang mencakup seluruh wilayah di dunia (Archer, 2001 : 66).

Dari yang telah dipaparkan di atas, disimpulkan bahwa Organisasi Internasional merupakan sebuah kerja sama antar negara, juga sebagai wadah atau instrumen antar anggotanya atau sebagai pengatur yang ikut membantu atau memberikan arahan dalam kebijakan antar pemerintah di negara masing-masing, sebagai salah satu mekanisme untuk menentukan karakter dan struktur kekuasaan secara internasional.

2.1.3 Kerja Sama Internasional

Kerja sama (*cooperation*) internasional merupakan salah satu pola hubungan atau interaksi dalam pergaulan masyarakat internasional, kerja sama dapat dilakukan dalam beberapa bidang seperti bidang ekonomi, politik, keamanan atau perdamaian, budaya dan hak asasi manusia baik oleh pelaku negara (*state actor*) maupun oleh pelaku bukan negara (*non-state actor*). Dari pola kerja sama

dalam hubungan internasional ini diharapkan dapat memberikan perubahan terhadap aktornya yaitu negara dalam mengembangkan kemajuan dalam segala bidang baik seara internal maupun eksternal.

Kerjasama antar negara dapat terjadi dalam rangka mencapai kepentingan masing-masing negara yang saling bertemu. Kerjasama juga dilakukan dalam menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh negara. Kerjasama menjadi suatu hal yang lazim bagi negara- negara di dunia sekarang ini. Kerjasama juga tidak hanya terbatas pada hubungan antar aktor negara, tetapi juga dapat melibatkan aktor non-negara. Ditambah lagi dengan fenomena globalisasi yang memperluas kesempatan aktor-aktor hubungan internasional untuk saling berinteraksi (Sudagung, 2015: 31).

Kerjasama internasional terjadi karena adanya komitmen antar negara, kepercayaan antar negara dan keinginan dari negara yang melakukan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan negara-negara tersebut daripada suatu negara itu berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhannya sehingga kerjasama tersebut akan menguntungkan kedua belah pihak (Nurhakim, 2017: 28).

Menurut Betsil (2006), “Politik lingkungan internasional dalam kerja sama internasional adalah ketergantungan antar aktor akan membuat mereka melakukan kerja sama untuk menghadapi sebuah ancaman yang akan membahayakan kepentingan nasional”.

Dalam suatu kerja sama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerja sama internasional adalah sisi lain dari konflik

internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dari kerja sama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerja sama tersebut dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerja sama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan (Perwita & Yani, 2005 : 33-34).

Kerja sama merupakan sebuah keharusan melakukan kesamaan tujuan atau kepentingan, dan dalam kerja sama internasional terdapat perbedaan kepentingan nasional diantara masing-masing negara, tetapi itu tidak masalah selama kerja sama memiliki tujuan sebagai kepentingan yang dapat disepakati secara sesama.

2.1.4 Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional merupakan konsep yang paling dikenal luas di kalangan para pelajar hubungan internasional dan politik internasional baik itu pengamat aliran tradisional atau saintifik. Hal ini terjadi selama negara bangsa (*Nation State*) masih merupakan aktor yang utama dalam hubungan internasional. Semua ahli agaknya sepakat bahwa determinan utama yang menggerakkan negaranegara menjalankan hubungan internasional (*International Relation*) adalah kepentingan nasionalnya.

Konsep kepentingan nasional juga mempunyai indikasi, dimana negara atau *state* berperan sebagai aktor utama didalam formulasi politik yang merdeka berdaulat. Selanjutnya didalam mekanisme interaksinya masing-masing negara atau aktor berupaya untuk mengejar kepentingan nasionalnya. Kepentingan inilah

yang akhirnya diformulasikan ke dalam konsep “*power*” kepentingan “*interest*” didefinisikan ke dalam terminologi *power* (Sitepu, 2011 : 56).

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik - ekonomi, militer, dan sosial - budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu “*power*” yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dapat dihindari akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara (Sitepu, 2011 : 163).

Coulombis dan Wolfe membagi unsur-unsur kekuatan nasional dua kategori atau penggolongan:

1. *Tangible elements* (yang konkret nyata wujudnya dan dapat diukur)
 - a. Populasi (jumlah penduduk)
 - b. Luas wilayah (termasuk letak-letak geopolitik atau geostrategis)
 - c. Sumber alam dan kapasitas industri
 - d. Kapasitas produksi pertanian
 - e. Kekuatan dan mobilitas militer
2. *Intangible elements* (tidak dapat diukur)
 - a. Kepemimpinan nasional (*leadership and personality*)
 - b. Pendayagunaan (efisiensi) organisasi - birokrasi

- c. Tipe dan gaya pemerintahan
- d. Keterpaduan masyarakat (*social cohesiveness*)
- e. Diplomasi, dukungan luar negeri, dan kebergantungan Peristiwa-peristiwa tertentu

Menurut Robinson, terdapat beberapa klasifikasi yang membagi kepentingan nasional yaitu:

1. *Primary Interest*, dalam kepentingan nasional ini perlindungan atas wilayah, negara, identitas politik, kebudayaan dan kelanjutan hidup bangsa terhadap berbagai gangguan dari luar. Semua negara mempunyai kepentingan ini dan sering dipertahankan dengan pengorbanan besar sehingga pencapaian kepentingan primer ini tidak pernah dikompromikan.
2. *Secondary Interest*, kepentingan selain kepentingan primer tetapi cukup memberikan kontribusi, seperti melindungi warga negara di luar negeri dan mempertahankan kekebalan diplomatik di luar negeri.
3. *Permanent Interest*, merupakan kepentingan yang bersifat konstan dalam jangka waktu yang cukup lama.
4. *Variable Interest*, merupakan kepentingan yang bersifat kondisional dan dianggap penting pada suatu waktu tertentu.
5. *General Interest*, kepentingan yang diberlakukan untuk banyak negara atau untuk beberapa bidang khusus seperti dalam bidang perdagangan dan lain-lain.
6. *Spesific Interest*, kepentingan yang tidak termasuk kepentingan umum, namun biasanya diturunkan dari sana

Kepentingan nasional sangat erat kaitannya dengan *power* negara sebagai tujuan maupun instrumen, khususnya yang bersifat destruktif (*hard power*). Ketika kepentingan nasional bertujuan untuk mengejar *power* dan *power* dipergunakan sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan nasional, maka konsekuensinya dalam sistem internasional yang dipersepsikan anarki—kecuali kekuasaannya sendiri—adalah kompetisi, kemunculan perimbangan kekuasaan, konflik dan perang (Bainus & Rachman, 2018: 109).

2.1.5 Ekonomi Politik Internasional

Era dewasa ini, hubungan antara ekonomi dan politik semakin tidak terpisahkan. Hal ini dikarenakan adanya kecenderungan dimana persoalan ekonomi juga mempengaruhi keputusan politik suatu Negara, begitupun sebaliknya, maka lahirlah studi Ekonomi Politik Internasional yang merupakan *intersection* antara ilmu politik yang terwujud melalui bentuk *state* dan ilmu ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk *market* merupakan pusat analisis dari studi Ekonomi Politik Internasional. Hal ini mungkin terjadi dikarenakan negara dan pasar saling memiliki keterkaitan satu sama lain, dimana tidak mungkin diantara mereka untuk berjalan sendiri. Menurut Robert Gilpin yang dikutip oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani dalam Pengantar *Ilmu Hubungan Internasional* mendefinisikan bahwa: “ekonomi-politik adalah dinamika interaksi global antara pengejaran kekuasaan (politik) dan pengejaran kekayaan (ekonomi),” (Perwita & Yani, 2005 : 76).

Lebih lanjut lagi menurut Robert Gilpin dan Roger Tooze yang dikutip oleh Bob Sugeng Hadiwinata dalam *Politik Bisnis Internasional* mendefinisikan bahwa:

“Politik Ekonomi sebagai suatu sub disiplin yang membahas tentang interaksi antara berbagai aktivitas politik dan ekonomi dengan menggunakan berbagai paradigma, perspektif, teori dan metode yang diambil dari disiplin ilmu politik dan ilmu ekonomi”.

Antara ilmu politik dan juga ilmu ekonomi memiliki keterkaitan yang erat dan terdapat hubungan timbal balik antara kedua ilmu tersebut. Sebagai contoh menurut Perwita & Yani (2005) yang dituangkan dalam buku Pengantar Ilmu Hubungan Internasional bahwa: “Secara umum Ekonomi Politik Internasional merupakan studi yang mempelajari saling keterhubungan antara ekonomi internasional dengan politik internasional, yang muncul akibat berkembangnya masalah- masalah yang terjadi dalam sistem internasional” (Perwita & Yani, 2005 : 75).

Menurut Robert Keohane mengemukakan suatu pendekatan yang menekankan pada pentingnya faktor kekuasaan didalam menganalisis hubungan ekonomi antarbangsa, yang dikutip oleh Bob Sugeng Hadiwinata dalam *Politik Bisnis Internasional* bahwa: “Didalam perekonomian dunia, kapan pun juga, para pelakunya menggunakan kekuasaan (*power*) untuk saling memberikan pengaruh satu sama lain agar dapat mencapai tujuan masing-masing. Hal inilah yang membuat ekonomi internasional sarat dengan muatan politik”.

Ekonomi politik internasional sendiri secara sederhana dapat diartikan menjadi dua kata yaitu *state* (Negara) dan *market* (pasar). Negara dalam hubungannya dengan negara lain pasti berkeinginan untuk memenuhi kepentingannya. Untuk mencapai hal tersebut negara dapat memanipulasi kekuatan

pasar untuk meningkatkan *power* dan pengaruh (Gilpin, 2001 dalam Suryadi, 2015: 5). Jadi, studi ekonomi politik internasional sangat bermanfaat bagi kita untuk mempelajari interaksi aktor-aktor negara dan bahwa pada kenyataannya politik dan ekonomi saling bersinggungan.

2.1.6 Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang

Grand theory pada penelitian ini adalah Ekonomi Pembangunan. Ilmu ekonomi pembangunan merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang khususnya mempelajari tentang kondisi perekonomian yang terjadi pada suatu negara. Ekonomi pembangunan adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita riil mengalami kenaikan dalam jangka panjang atau jika laju pembangunan lebih besar daripada laju pertumbuhan penduduk sehingga pendapatan per kapita riil meningkat.

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan pendapatan perkapita serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat (Mosey:2016). Menurut Mankiw (2007: 182) pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dan penentu adanya kebijakan pembangunan selanjutnya. Suatu negara dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi kenaikan pendapatan nasional dan peningkatan output. Kenaikan pendapatan nasional dapat dilihat dari besarnya jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihasilkan setiap tahun. Sebagai negara berkembang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dalam proses pembangunannya dihadapkan dengan keterbatasan modal untuk investasi pembangunan (Mukhlis: 2015). Sedangkan menurut Todaro (2006) salah satu

komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara adalah akumulasi modal.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang fokus terhadap pembangunan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonominya. Pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan dari keterbelakangan menjadi kondisi yang lebih maju sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat (Sukirno: 2007).

Sedangkan menurut (Mariska: 2016) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Indonesia menganut perekonomian terbuka dimana dalam menjalankan perekonomiannya pemerintah tidak luput akan adanya interaksi dari pihak swasta maupun negara-negara lain. Dalam hal ini, Indonesia tentu memerlukan pembiayaan yang cukup besar untuk membangun perekonomian yang merata dan sejahtera bagi rakyatnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menjadi indikator keberhasilan negara dalam menjalankan roda pembangunan, yang pada akhirnya digunakan sepenuhnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seperti halnya negara berkembang lainnya Indonesia mengandalkan utang luar negeri untuk membiayai pembangunan. Namun dalam perkembangannya utang luar negeri telah mengarah menjadi sumber dana defisit fiskal.

2.2 Kerangka Pemikiran

IMT-GT merupakan kerja sama subregional antar daerah di kawasan barat ASEAN. Segitiga pertumbuhan ini merupakan wilayah kerja yang cukup luas dan cukup potensial karena lingkup ekonominya (economies of scale) menjadi lebih luas. Dewasa ini IMT-GT semakin ekspansif akibat bertambahnya komoditas utama yang dilakukan.

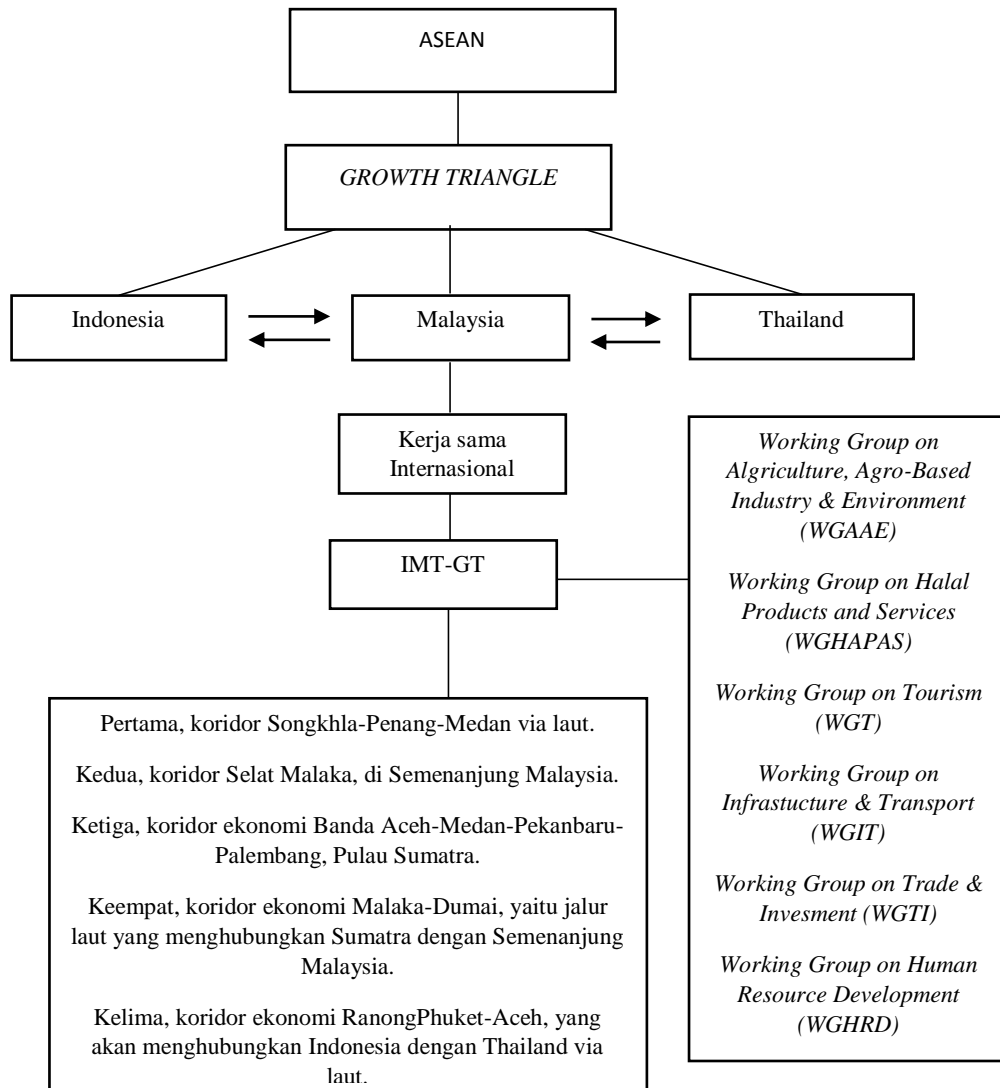
Segitiga pertumbuhan daerah atau growth triangle didefinisikan sebagai kerja sama ekonomi sub regional yang bersifat cross administrative boundary dan menyangkut tiga atau lebih daerah dari beberapa Negara yang berdekatan secara geografis. Juga dikenal sebagai zona ekonomi sub regional, zona ini dimaksudkan sebagai zona investasi yang berorientasi ke luar, yang bergeser dari keunggulan komparatif menuju keunggulan kompetitif sub-regional, dengan bertujuan menciptakan perdagangan (*trade creation*).

Segitiga pertumbuhan dapat dikatakan sebagai alat untuk meningkatkan investasi dan perdagangan antar daerah di kawasan tersebut dan selanjutnya menyebarkan keuntungan bagi daerah lain. Dari sudut kerja sama, IMT-GT melakukan pelaksanaan kerja (*working groups*) yaitu *Working Group on Agriculture, Agro-Based Industry & Environment (WGAAE)*, *Working Group on Tourism (WGT)*, *Working Group on Infrastructure & Transport (WGIT)*, dan *Working Group on Trade & Investment (WGTI)*.

IMT-GT berperan dalam mendukung penguatan infrastruktur transportasi dan energi di kawasan. Beberapa program pembangunan transportasi jalan yang dicanangkan didalam IMT-GT secara langsung bersinergi dengan rencana

pembangunan *ASEAN Highway Network* (AHN) yang menjadi program unggulan dalam pembangunan konektivitas darat ASEAN. Selain itu, program pembangunan lima koridor ekonomi prioritas dalam IMT-GT juga turut mendukung upaya untuk menciptakan ASEAN yang lebih terintegrasi secara fisik, baik dari segi daratan maupun konektivitas melalui jalur laut. Kelima koridor tersebut adalah koridor Songkhla - Penang - Medan, koridor Selat Malaka, koridor ekonomi Banda Aceh - Medan - PekanbaruPalembang, koridor ekonomi Malaka - Dumai, serta koridor ekonomi Ranong - Phuket - Aceh. Panjang jalan yang ada di kawasan Indonesia termasuk dalam proyek AH150 sepanjang 1.762,3 km dan AH151 sepanjang 611,9 km yang melintasi Pekanbaru - Bukittinggi - Pematang Siantar - Jambi - Sarolangun; Bengkulu - Lubuk Linggau - Lahat. Mayoritas dari dua segmen yang ada di Indonesia tersebut juga merupakan program pembangunan yang ada dalam *IMT-GT Implementation Blueprint* 2012-2016 dan termasuk proyek penting dalam pembangunan Koridor Ekonomi 3 IMT-GT.29. Selain dua segmen tersebut, segmen lain yang juga termasuk dalam koridor ekonomi IMT-GT di Indonesia adalah jalur AH25 sepanjang 141,55 km yang melintasi Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung, Bakauheni, dan Merak. Secara umum, kualitas jalan yang ada di lintas Sumatra terbilang lebih rendah dan kurang berkembang apabila dibandingkan dengan kualitas jalan darat yang menghubungkan Malaysia dan Thailand. Tantangan ini perlu menjadi perhatian bagi IMT-GT untuk mengembangkan lebih lanjut konektivitas darat di kawasan yang tercakup dalam kerja samanya dalam rangka mendukung konektivitas yang dirancang oleh ASEAN.

2.2.1 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

